

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DINAS
PERHUBUNGAN KOTA SEMRANG**

Arini Novandalina¹, Fidyah Yuli Ernawati²
STIE SEMARANG Jurusan akuntansi¹, Jurusan Manajemen²
arini.novandalina@gmail.com, fidyah@stiesemarang.ac.id

Abstract. The increasing demands of the community for good government governance, has encouraged the central government and local governments to implement public accountability. This study aims to determine the effect of the application of public sector accounting and internal controls on the quality of the Semarang City Transportation Agency's financial reports.

The population in this study were all 124 employees at the Semarang City Transportation Agency. The sample in this study used Cluster Random Sampling, which is a method of sampling by cluster. The population is divided into large sampling units called clusters.

The results of this study indicate that the variables of the application of public sector accounting, internal control on the quality of financial reports have a positive and significant effect on the performance accountability of government agencies. This is indicated by the results obtained from the partial test (t test) for variable X1 with a value of $2.287 > 1.96$ with a significance of $0.037 < 0.05$ and for variable X2 with a value of $2.647 > 1.96$ with a significance of $0.012 < 0.05$. This means that if the public sector accounting reporting standards and supervision of the quality of financial reports can be improved, it will produce good accountability performance.

The conclusion of this study is that the application of public sector accounting and internal supervision has a positive effect on the quality of financial reports, this indicates that the higher the application of public sector accounting and internal controls, the higher the quality of financial reports.

Keywords: Public Sector Accounting Implementation, Internal Control, Quality of Financial Statements

Abstrak. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dishub Kota Semarang.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Dishub Kota Semarang berjumlah 124 pegawai. Sampel dalam penelitian ini menggunakan Cluster Random

Sampling yaitu merupakan cara pengambilan sampel dengan cara gugus. Populasi dibagi kedalam satuan-satuan sampling yang besar yang disebut cluster.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan hasil yang didapatkan dari uji parsial (uji t) untuk variabel X_1 dengan nilai $2,287 > 1,96$ dengan signifikansi $0,037 < 0,05$ dan variabel X_2 dengan nilai $2,647 > 1,96$ dengan signifikansi $0,012 < 0,05$. Berarti, jika standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan dapat ditingkatkan maka akan menghasilkan kinerja akuntabilitas yang baik.

Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.

Kata kunci : Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Internal, Kualitas Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Undang – undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti Undang – Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sendiri. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem akuntansi yang

baik, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ponamon, 2018).

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah

dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan,

menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik dimana penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggungjawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran, sehingga semangat reformasi pemerintah dan pembangunan serta kemasyarakatan telah mewarnai upaya pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita – citanya, ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (KLK) (Adha dkk, 2014).

Adapun penanggung jawab penyusunan Laporan Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKLK) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggungjawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan instansi bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya (Latifah,

dan hak menuntut pertanggungjawaban (Adha dkk, 2014). penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat (2017). Dalam proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah. (Riantiarno dan Azlina, 2012) menegaskan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu untuk dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini masih banyak laporan keuangan yang disusun tidak berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang tidak memperoleh opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini yang diperoleh oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang yaitu wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP), tidak wajar (TW), dan wajar dengan pengecualian (WDP). Opini tidak wajar dan tidak memberikan pendapat yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang tersebut dapat menimbulkan pertanyaan dari kalangan masyarakat mengenai kemungkinan telah terjadi

banyak penyimpangan anggaran. Peneliti Ponamon, Irene Fransiska, (2018) mengatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Andini, Dewi, dan Yusrawati, (2015) mengatakan bahwa penerapan system akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara umum, beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan tersebut belum memperoleh opini WTP adalah karena lemahnya pengawasan internal, penyajian yang belum

MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Adakah pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, 2. Adakah pengaruh pengawasan internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang

KAJIAN TEORITIS

A. Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan

informasi laporan keuangan. Pamungkas, Bambang, (2013) juga mengatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh

sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kurang memadainya kapasitas SDM pengelola keuangan. Dari latar belakang diatas maka judul penelitian yang diuji adalah “**Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Semarang**”.

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kualitas Laporan Keuangan instansi pemerintah merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pengertian tersebut, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. Kualitas Laporan Keuangan instansi pemerintah

diatur berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019. Akuntabilitas juga atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan kualitas laporan keuangan secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik (Saputra, 2015). Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan Berdasarkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kualitas Laporan Keuangan

dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, pelaksanaan KLK harus berdasarkan antara lain pada prinsip – prinsip sebagai berikut (Saputra, 2015): 1.Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan,2.Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3.Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, 4.Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh, 5.Jujur, objektif, transparan, dan akurat, 6.Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Siklus Kualitas Laporan Keuangan Sistem kualitas laporan keuangan instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap - tahap sebagai berikut (Saputra, 2015) :1.Penetapan perencanaan strategik, 2.Pengukuran kinerja, 3.Pelaporan kinerja, 4.Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pada akhir suatu periode, capaian kinerja tersebut dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan atau yang meminta dalam bentuk Laporan Kualitas Laporan

Kuangan Instansi Pemerintah (LKLK). Tahap terakhir, informasi yang termuat dalam LKLK tersebut dimanfaatkan bagi perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif tersebut antara lain sebagai berikut :1.Relevan, 2.Andal,3.Dapat dibandingkan,4.Dapat dipahami.

B. Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah Daerah. Dalam implementasi pengelola keuangan daerah diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman memadai tentang sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang handal. Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian

ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi

laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.

Ada beberapa hal harus dipertimbangkan dalam penerapan standar akuntansi (Septiani, 2013), antara lain : 1.Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi, 2.Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran, 3.Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisien ekonomi serta tujuan sosial lainnya, 4.Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh

pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

C. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mengarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suyono, 2016) yang menyimpulkan bahwa implementasi pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan

dan Bestari, 2015) yaitu audit internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

keuangan daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh (Surastiani

D. Teori Keagenan

Menurut Sardi dkk, (2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

E. Teori Entitas

Kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (reporting entity) yang bertanggungjawab kepada pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban entitas pelaporan sedangkan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawaban (Sari, 2015).

Septiani, (2013) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan keuangan. Dijelaskan pula mengenai entitas pelaporan dalam Undang-Undang pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang

berbunyi: “Tiap-tiap kementerian Negara / lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib.

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sejumlah 124 pegawai.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Cluster Random Sampling*. *Cluster Random Sampling* merupakan cara pengambilan sampel dengan cara gugus. Populasi dibagi kedalam satuan-satuan sampling yang besar yang disebut cluster. Sampel ini digunakan untuk meneliti tentang

menyampaikan laporan bertanggungjawab berupa laporan keuangan”.

1. Populasi dan Sampel

suatu hal pada bagian-bagian yang berbeda di dalam suatu instansi. Maka sampel yang dipakai adalah bagian keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang berjumlah 42 pegawai.

2. Variabel Penelitian

Untuk memudahkan suatu penelitian berangkat dan bermuara pada satu tujuan yang jelas, maka penelitian itu disimplifikasi kedalam bangunan variabel. Variabel adalah suatu atribut atau atau sifat dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah Kualitas Laporan Keuangan dan variabel independen yang digunakan adalah Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1) dan Pengawasan Internal (X_2).

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X_1)	Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah bekerja sesuai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas penerapan akuntansi 2. Membuat laporan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi 3. Teliti dalam membuat laporan akuntansi

	standar yang berlaku	4. Mencatat semua laporan akuntansi
Pengawasan Internal (X ₂)	Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senang dengan pengawasan yang dilakukan 2. Pengawasan bersifat transparan 3. Bekerja dengan hati-hati 4. Bekerja dengan cermat
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami

3. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara

Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner dan

wawancara secara langsung kepada para responden. Setiap responden diminta pendapatnya dengan memberikan jawaban dari pernyataan-pernyataan yang diajukan.

2. Kuesioner

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada alternatif jawaban terdiri dari lima buah jawaban pada setiap pernyataan. Sehingga responden dapat memilih salah satu jawaban yang paling mendekati pendapatnya. Kuesioner dan wawancara ini secara langsung kepada responden dengan bantuan petugas kepegawaian pada masing-masing bagian yang ada di Dishub Kota Semarang.

4. Metode Analisis Data

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, model penelitian telah memenuhi uji asumsi klasik dimana dalam model tidak terjadi multikolenearitas, heterokedastisitas, dan model berdistribusi normal. Maka metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda, Hipotesis Uji t dan Uji F serta koefisiensi Determinasi

Hasil dan Pembahasan

2. Penerapan akuntansi sektor publik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,462, arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa

1. Dari hasil spss dapat diketahui bahwa semua variabel valid dan reliable. Pada uji asumsi klasik (uji multikolearitas, heterokedastisitas, dan normalitas) semua variabel memenuhi syarat, yaitu pada uji multikolearitas tidak terjadi multikolearitas, uji heterokedastisitas bahwa pada model penelitian tidak terjadi heterokedastisitas, dan uji normalitas yaitu berdistribusi normal sehingga persyaratan normalitas terpenuhi.

2. Uji Regresi Berganda persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,300 + 0,462 X_1 + 0,573 X_2$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa nilai konstanta sebesar 0,300 artinya tanpa ada pengaruh dari penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal, kualitas laporan keuangan punya nilai sebesar 0,300.

organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik yang baik memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

3. Pengawasan internal mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,573, arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif pengawasan

internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang mempunyai pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3. Uji Partial (uji t)

1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pengujian secara parsial variabel XI (penerapan akuntansi sektor publik) memiliki koefisien regresi sebesar 0,284, nilai t hitung sebesar 2,287 dengan signifikansi sebesar 0,037. Nilai t hitung sebesar 2,287 yang lebih besar dari t tabel (1,96) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,037, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka hipotesis 1 dapat diterima.

Arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini

Koefisien determinasi merupakan penunjuk mengenai besarnya pengaruh variabel

mengindikasikan bahwa organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik dengan baik memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

2. Pengaruh Pengawasan Internal (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pengujian secara parsial variabel X2 (pengawasan internal) memiliki koefisien regresi sebesar 0,414, nilai t hitung sebesar 2,647 dengan signifikansi sebesar 0,012. Nilai t hitung sebesar 2,647 lebih besar dari t tabel (1,96) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan internal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, maka hipotesis 2 dapat diterima.

Arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang mempunyai pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

4. Koefisiensi Determinasi (R^2)

bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien

determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R2.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.628 ^a	.394	.363	.87138	1.870

a. Predictors: (Constant), PI, PASP

b. Dependent Variable: KLK

PEMBAHASAN

1 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis 1 diterima, dimana arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif penerapan akuntansi sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang menerapkan akuntansi sektor publik dengan baik memiliki kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Hal ini berarti bahwa pegawai bagian akuntansi/keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang telah memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andini dkk, (2015) yaitu penerapan system akuntansi daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga mendukung penelitian Herawati dkk, (2017) yaitu penerapan standar akuntansi

pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis 2 diterima, dimana arah koefisien regresi positif menunjukkan adanya pengaruh positif pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi yang mempunyai pengawasan internal yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa kegiatan pengawasan internal telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga Dinas Perhubungan Kota Semarang menjamin bahwa semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ponamon, (2018) yaitu pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian ini juga mendukung penelitian Pamungkas dan Bambang, (2013) yaitu pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.
2. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang semakin tinggi, maka kualitas laporan keuangan semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Wendi., Vince Rahmawati dan Al Azhar. A. "Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai)". *JOM FEKON*, 1, no. 2 (2014): h. 1-15.

Andi 2014, Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Menggunakan SPSS, Wahana Komputer, Yogyakarta

2 Saran

Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu meningkatkan penerapan akuntansi sektor publik, dimana pegawai bagian akuntansi/keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu memahami proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.

Dinas Perhubungan Kota Semarang perlu meningkatkan pengawasan internal, dimana kegiatan pengawasan internal perlu dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga Dinas Perhubungan Kota Semarang dapat menjamin bahwa semua pencatatan akuntansi dan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga tujuan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dapat tercapai.

Andi 2014, SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis, Duwi Priyatno, Yogyakarta

Andini, Dewi dan Yusrawati. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 24, no. 1 (2015): h. 65-82.

Arikunto, Suharsimi 2010, Prosedur Penelitian, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta

- Bastian, Indra 2007, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, Erlangga, Jakarta
- Ghozali, Imam 2016, Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hanifa, Lia., Andi Basru Wawo dan Husin. "Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1, no. 2 (2016): h. 65-80.
- Hardyansyah dan Ansyarif Khalid. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 1, no. 1 (2016): 41-65.
- Herawati, Tuti dan Defi Nopianti. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *STAR – Study & Accounting Research*, 14, no. 2 (2017): 10-45
- Inapty, M. Ali Fikri Biana dan Rr. Sri Pancawati Martiningsih. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9, no. 1 (2016): h. 27-42.
- Kusumah, AA 2012, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 4, No.2, Hal. 32-33
- Lasoma, VA 2011, Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1, Hal 32-33
- Latifah, Asyiyhatul. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Bantul)". *Artikel*, (2017): h. 1-14.
- Maryani, Novita Iis. "Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Artikel*, (2016): h. 1-29.

- Nordiawan, Deddy 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat, Jakarta
- Nordiawan, Deddy dkk 2008, *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta
- Pamungkas, Bambang. "Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Ilmiah Ranggading*, 12, no. 2 (2012): h. 1-13.
- Ponamon, Irene Fransisca, (2018), "Pengaruh pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD pemerintah kota Manado," *Jurnal Ekonomi*
- Prasetyo, Bambang dan Jannah LM 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Puriyatno, Duwi 2014, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, Andi Offset, Yogyakarta
- Riahi, Ahmad dan Belkaoui 2006, *Accounting Theor*, Edisi 1, Salemba Empat, Jakarta IJCCS ISSN: 1978-1520 v Title of manuscript is short and clear, implies research results (First Author) 15
- Riantiarno, R dan Azlina, N 2012, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, Hal. 32-33
- Santosa, Urip 2008, Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kualitas laporan keuangan Instansi Pemerintah, *Jurnal Akuntansi*, Vol.
- Saputra, Berry Wan. "Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Kota Pekanbaru)". *JOM FEKON*, 2, no. 2 (2015): h. 1-15.
- Sardi, Santha Julia., H. Ahmad Rifa dan L.Hamdani Husna. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12, no. 2 (2016): h. 158-172.
- Sari, Eka Nurmala. Accounting Practices Effectiveness and Good Governance: Mediating Effect of Medan City, Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 6, no. 2 (2015): h. 1-11.
- Septiani, Tika. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

- Tahun Sebelumnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”. *Jurnal Graje Akuntansi*, 1, no. 1 (2013): h. 63-77
- Subaweh, I dan Nugraheni, P 2008, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 13, No. 1, Hal. 32-33
- Surastiani, Dyah Puri dan Bestari Dwi Handyani. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7, no. 2 (2015): h. 139-149.
- Susilo Prpto, 2008. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Suyono, Nanang Agus. “Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo)”. *Jurnal PPKM III*, (2016): h. 237-248.
- Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Informasi Teknologi Pemanfaatan Kehandalan Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi
- Zuliarti, 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah : Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus. Skripsi